

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PROGRAM
PENDIDIKAN TANGGUH BENCANA DI DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN,
KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

***THE IMPLEMENTATION OF DISASTER MANAGEMENT POLICY BY DISASTER RESISTANCE
EDUCATION PROGRAM IN KEPUHARJO VILLAGE, CANGKRINGAN DISTRICT, SLEMAN
REGENCY, YOGYAKARTA***

Kharitsatun Jamilah

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

Kharitsa.jamil@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) Implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui program pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo, Cangkingan, Sleman, Yogyakarta. (2) Kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana melalui program pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui program pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan tangguh bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana. Desa Kepuharjo tahun ini sudah masuk pada desa/kelurahan tangguh bencana tingkat madya. (2) Kendala internal yaitu terkait sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kemudian kendala eksternal adalah permasalahan pendanaan belum ada karena mengganggu pencairan dana dari pemerintah.

Kata kunci: pendidikan tangguh bencana, pelatihan tangguh bencana, masyarakat.

Abstract

This research aimed to describe: (1) implementation of disaster management policy by disaster resistance education program in Kepuharjo village, Cangkringan district, Sleman regency, Yogyakarta (2) The obstacles in implementation of disaster management policy by disaster resistance education program in Kepuharjo village, Cangkringan district, Sleman regency, Yogyakarta. This research method used qualitative descriptive approach. The results of this research that is: (1) implementation of disaster management policy by disaster resistance education program in Kepuharjo village that is by organizing disaster resistance training to improve community capacity for disaster management. (2) internal constraints in implementation of disaster management policy by disaster resistance education program that is related to inadequate facilities and infrastructure. Then the external constraints that are related to funding issues have not existed because of waiting for the disbursement of funds from the government.

Keyword: disaster resistance education, training disaster resistance, peoples

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting bagi keberlangsungan manusia di dalam kehidupan. Pendidikan tidak hanya dalam bentuk formal atau biasa dikenal dengan lembaga sekolah maupun lembaga pendidikan tinggi. Tetapi juga ada pendidikan dalam bentuk informal maupun non-formal. Dalam bentuk informal sering diketahui oleh masyarakat sebagai pendidikan dalam keluarga. Lalu untuk pendidikan dalam bentuk non-formal yaitu pendidikan dalam masyarakat.

Pendidikan formal maupun non-formal tidak lepas dari kebijakan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam pendidikan pada masyarakat yaitu salah satunya pendidikan tangguh bencana (Avianto Amri, 2017: 24). Kebijakan pendidikan tangguh bencana di masyarakat sangat di perlukan karena mengingat di Indonesia termasuk dalam wilayah rawan bencana.

Bencana merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya ancaman dan mengganggu kehidupan serta penghidupan makhluk hidup yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, jatuhnya korban jiwa serta dampak psikologis bagi masyarakat yang terkena bencana, dan kerugian harta benda.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 disebutkan ada beberapa macam bencana yaitu:

- a. Bencana alam ialah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, kekeringan, dan tanah longsor.
- b. Bencana non alam ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa seperti gagalnya teknologi, gagal modernisasi, epidermik, dan wabah penyakit.

Bencana sosial ialah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan manusia seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Bencana yang sudah terjadi di Indonesia seperti gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 di Aceh dan Sumatera Utara, gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta, sering terjadinya banjir di Jakarta, gempa bumi tahun 2009 di Sumatera Barat dan Jambi, gempa bumi dan tsunami tahun 2009 di Jawa Barat erupsi Gunung Merapi tahun 2010 di Yogyakarta, gempa bumi dan tsunami di Mentawai tahun 2010, gempa bumi di Aceh tahun 2013, terjadinya banjir di Manado tahun 2014, bencana kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan tahun 2015 dan gempa bumi tahun 2016 di Pidie Jaya, Pidie dan Bireun (Avianto Amri, 2017: 12) .

Bencana yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor alam. Terjadinya banyak korban terutama masyarakat yang di sebabkan oleh bencana alam. Melihat dari sebagian besar bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan yang menjadi korban adalah masyarakat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bekerjasama untuk memberikan pendidikan tangguh bencana pada masyarakat terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki potensi rawan atau risiko bencana.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi bencana alam yang terdiri dari beberapa bencana alam, di antaranya kebakaran, banjir, angin puting beliung, kekeringan, meletusnya gunung merapi, longsor, dan gempa bumi. Letak geografis Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu: Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara, Kabupaten Klaten di bagian timur laut, Kabupaten

Magelang di bagian barat laut dan Kabupaten Purworejo di bagian barat. Secara astronomis Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS – 8 12' LS dan 110 00' BT – 110 -50' BT (Jogjapro, 2016).

Bencana besar yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu bencana gempa bumi pada hari Sabtu Wage tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.54.01 WIB yang berkekuatan 5,9 SR, sedangkan *United States Geological Survey* (USGS) mencatat kekuatannya sebesar 6,2 Mw. Gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta sangat mengagetkan masyarakat di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, karena gempa bumi merupakan gempa terbesar sepanjang sejarah di Yogyakarta dan pada saat bersamaan Pemerintah Daerah dan masyarakat sedang fokus pada upaya mitigasi letusan gunung Merapi yang aktivitasnya meningkat (Geomagz, 2016).

Gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 telah mengakibatkan bencana lebih dari 5.000 orang meninggal, kerugian harta benda yang besar, dan banyak kerusakan lingkungan. Sejumlah retakan tanah, likuifaksi, dan longsoran terjadi di wilayah Yogyakarta yang menandakan guncangan gempa yang cukup kuat. Daerah Bantul mengalami bencana terparah, sehingga gempa bumi pada tahun 2006 menjadi bencana terparah, juga disebut sebagai gempa bumi dengan korban terbanyak sejak tahun 1612 di Indonesia (Geomagz, 2016)

Sebagian wilayah Yogyakarta merupakan dataran tertutup oleh endapan rombakan gunung api muda hasil kegiatan gunung Merapi. Bagian lainnya tertutup oleh endapan alluvium. Hal ini menjadikan sebagian besar wilayah Yogyakarta memiliki tanah yang subur dan air yang melimpah sehingga pemukiman dan aktivitas penduduk terkonsentrasi disini. Daerah Istimewa Yogyakarta

merupakan wilayah yang rawan bencana seperti gempa dan tsunami. Sumber gempa di wilayah Yogyakarta terletak di laut dari bagian zona subduksi dan di darat dari sesar aktif (Geomagz, 2016).

Bencana yang terjadi selain gempa di daerah Yogyakarta juga terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi tepatnya tanggal 26 Oktober 2010. Gunung Merapi mengalami tahap erupsi pada pukul 17.02 WIB, letusan Gunung Merapi ditandai dengan keluarnya material vulkanik yang membumbung tinggi setinggi 1,5 kilometer. Ancaman khas Gunung Merapi yaitu berupa awan panas atau *wedhus gembel* (Geomagz, 2016).

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) erupsi tahun 2010 menelan korban jiwa sebanyak 347 orang. Korban terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu 246 korban jiwa, di Magelang sebanyak 52 korban jiwa, Klaten 29 korban jiwa, serta di Boyolali 10 korban jiwa, sementara pengungsi mencapai 410.388 orang (Tribun Jogja, 2016). Selain terjadinya bencana gempa bumi dan meletusnya Gunung Merapi juga banyak bencana yang terjadi di Yogyakarta seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan potensi terjadinya tsunami.

Berdasarkan data-data dari Koran Tribun Jogja, laman website Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil pra-observasi yaitu perlunya pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta agar pemangku kepentingan dalam pemerintah daerah mampu untuk membuat program yang berupa pelatihan pendidikan tangguh bencana. Pelatihan dilaksanakan setiap satu bulan selama tiga hari, hari pertama yaitu materi, hari kedua dan hari

ketiga yaitu pelatihan tangguh bencana dalam bentuk pendidikan non-formal yaitu di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan tangguh bencana sangat penting untuk masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan atau risiko bencana.

Peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana dilakukan untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan atau risiko bencana. Desa Kepuharjo merupakan salah satu desa yang dekat dengan lokasi bencana alam yaitu Gunung Merapi. Desa Kepuharjo terletak 7 kilometer dari puncak Gunung Merapi, masih terdapat masyarakat yang bermukim didekat dengan Gunung Merapi yaitu dusun Koping.

Senyatanya dalam implementasi pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo telah menyelenggarakan pelatihan tangguh bencana. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Kepuharjo yaitu pelatihan yang diadakan setiap setahun sekali karena keterbatasan dana dan waktu. Pendanaan yang terlambat pencairan dana dikarenakan laporan pertanggung jawaban dana desa pada tahap pertama belum seluruh desa yang ada di Kecamatan Cangkringan selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Fasilitas di Desa Kepuharjo kurang memadai seperti tidak adanya telepon rumah dikarenakan adanya faktor geografis dari Desa Kepuharjo.

Masyarakat Desa Kepuharjo bila melakukan komunikasi hanya mengandalkan telepon genggam atau *smartphone* terkadang komunikasi kurang lancar karena sinyal yang kurang memadai. Jarak rumah warga RT (Rukun Tetangga) satu dengan rumah warga RT (Rukun Tetangga) yang lain lumayan jauh karena masih banyak lahan kebun. Informasi yang tersebar dimasyarakat mengenai

Gunung Merapi terkadang simpang siur, karena belum adanya informasi yang dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah daerah tetapi informasinya sudah tersebar.

Kesenjangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo yaitu pelatihan tangguh bencana seharusnya dilaksanakan setiap bulan agar masyarakat desa lebih paham dengan pendidikan tangguh bencana, dalam setiap pelatihan dilakukan penjadwalan bagi setiap lapisan masyarakat berdasarkan umur yang akan mengikuti pelatihan tangguh bencana, dan masyarakat bisa melindungi diri dari bencana. Pada kenyataannya pelatihan tangguh bencana di Desa Kepuharjo dilaksanakan setiap satu tahun sekali karena terkendala dengan pendanaan. Selain permasalahan pendanaan juga partisipasi masyarakat yang diwakilkan dari setiap dusun di Desa Kepuharjo.

Hal ini memperjelas fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian di masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam memberikan pendidikan tangguh bencana dalam bentuk pendidikan non-formal pada masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan atau risiko bencana dan desa yang sudah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana yang setelahnya disingkat Destana. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Pendidikan Tangguh Bencana di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”**

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif karena data yang disajikan berupa kalimat Lexy J. Moeleong (2010: 6) menjelaskan deskripsi dari penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Kecenderungan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti meneliti pendidikan tangguh bencana untuk menggambarkan serta menguraikan karakteristik pendidikan pada tingkat pendidikan non-formal dimasyarakat dan menghimpun fakta yang ada dilapangan. Peneliti ingin mengetahui tentang pendidikan tangguh bencana di daerah rawan bencana yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau menguraikan dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana melalui program pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setting dan Waktu Penelitian

Setting/tempat penelitian dilakukan di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Setting* waktu pra-observasi penelitian dimulai pada bulan April sampai Agustus 2017. Kemudian penelitian dilapangan dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2017.

Sumber Data

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang menjadi sumber data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Dalam menentukan informan yang dijadikan sumber data penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan/sumber data berdasarkan seleksi khusus dan kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu orang yang mempunyai pengetahuan atau paham dalam bidang pendidikan tangguh bencana serta pelaksana dalam pendidikan tangguh bencana.

Berdasarkan tujuan penelitian ini, beberapa pihak yang menjadi subjek penelitian yaitu:

1. KA. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY
2. Kepala Bidang Kesra yang menangani Desa Tangguh Bencana, Tokoh masyarakat, dan masyarakat di Desa Kepuharjo.

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui program pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana. Instrumen pengumpulan data berasal dari peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen kunci yang dapat mengembangkan pedoman observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data atau uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif study kasus ini menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data dan waktu serta berbagai referensi seperti foto-foto serta data-data hasil dokumentasi sebagaimana penjelasan Sugiyono (2010: 372-374). Triangulasi yang digunakan dalam melakukan uji keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan wawancara pada informan satu dengan informan yang lain menggunakan pedoman wawancara yang sama. Sementara untuk melakukan triangulasi teknik melalui penggunaan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Observasi dilakukan untuk menguji keabsahan data mengenai manfaat dan dampak dari implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Analisis Data

Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2010: 337), berpendapat bahwa analisis data kualitatif terdiri dari:

Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh pada implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo dari aneka macam cara (observasi, wawancara, dokumentasi, pita rekaman dan lain-lain) dikumpulkan kemudian direduksi atau dipilah-pilah. Peneliti melakukan pengumpulan data selama penelitian di Desa Kepuharjo, kemudian peneliti mengolah data yang didapatkan saat dilapangan.

Reduksi Data

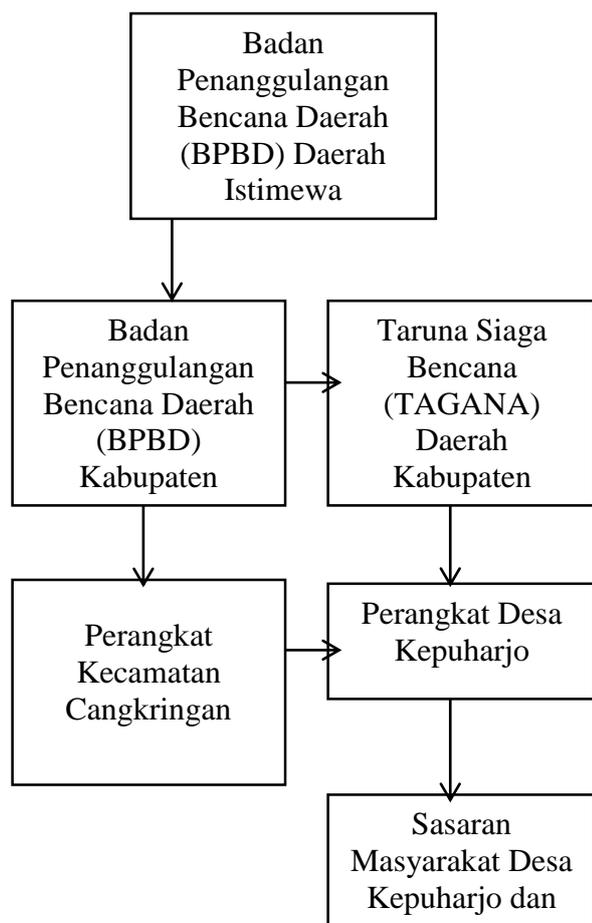
Proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis peneliti dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga peneliti dapat kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Penyajian Data

Kumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan sudah dipahami oleh peneliti yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari pengumpulan data di lapangan yang sudah di reduksi dengan benar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Pendidikan Tangguh Bencana di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada tingkat meso sebab di setiap daerah memiliki potensi bencana masing-masing yang disesuaikan dan dilihat berdasarkan hasil data serta analisis dari geografi wilayah tersebut. Peran dari BPBD DIY sebagai fasilitator untuk penyediaan sarana prasarana dan narasumber dalam pelaksanaan pendidikan serta kepelatihan tangguh bencana di desa. Selain sebagai fasilitator juga sebagai

penanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan serta kepelatihan di tingkat provinsi. BPBD DIY melakukan koordinasi dan pengawasan kepada BPBD Sleman terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tangguh bencana di tingkat kabupaten.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman berada pada tingkat mikro. Berperan sebagai fasilitator untuk penyediaan sarana prasarana dan narasumber dalam pelaksanaan pendidikan serta kepelatihan tangguh bencana di desa. Selain sebagai fasilitator juga sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan serta kepelatihan di tingkat kabupaten. BPBD Sleman melakukan koordinasi dengan BPBD DIY, perangkat Kecamatan Cangkringan, dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tangguh bencana di tingkat kabupaten.

Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sleman merupakan relawan binaan dari Dinas Sosial, yang selanjutnya disebut dengan TAGANA, TAGANA berada di setiap daerah di seluruh Indonesia. TAGANA di tingkat kabupaten memiliki peran untuk membantu serta berkoordinasi dengan BPBD Sleman dan perangkat Desa Kepuharjo dalam pelaksanaan pelatihan tangguh bencana. Sewaktu pelaksanaan pelatihan tangguh bencana di Desa Kepuharjo, pengurus TAGANA ada sebagian yang menjadi narasumber atau pemateri. Selain itu juga memfasilitasi dalam pelaksanaan pelatihan pada hari Kamis, 21 Desember 2017 dengan membawakan tenda sebagai praktik untuk membuat *shelter* atau pengungsian, dan mobil dapur umum untuk mempraktikkan pelatihan dapur umum.

Perangkat Kecamatan Cangkringan berperan dalam pengoordinasian dari BPBD Sleman kepada

perangkat Desa Kepuharjo. Selain sebagai pengoordinasi juga pelaksana pelatihan tangguh bencana pada tingkat Kecamatan. Perangkat Desa Kepuharjo sebagai pengoordinasi dan pelaksana pelatihan tangguh bencana di tingkat desa.

Masyarakat desa dan relawan desa sebagai sasaran dalam pelaksanaan pendidikan kepelatihan tangguh bencana. Sebab masyarakat perlu mendapatkan pendidikan pelatihan tangguh bencana agar masyarakat dapat melindungi diri dari ancaman bahaya bencana dan dapat mengetahui tindakan yang dilakukan sewaktu terjadinya bencana dan setelah terjadinya ancaman bahaya bencana. Peran dari relawan desa sebagai orang yang menolong saat terjadinya ancaman bahaya bencana serta untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan saat terjadinya dan setelah terjadinya ancaman bahaya.

Proses Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Pendidikan Tangguh Bencana di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Interpretasi

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan tangguh bencana sebagai program pendidikan tangguh bencana dengan membentuk desa/kelurahan tangguh bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya. Program pendidikan tangguh bencana yaitu adanya kegiatan pendidikan serta pelatihan tangguh bencana di desa/kelurahan rawan bencana. Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Pendidikan tangguh bencana dilaksanakan dengan menerapkan pelatihan

tangguh bencana sasarannya adalah masyarakat desa/kelurahan yang bertempat tinggal di daerah rawan atau risiko bencana. Terdapat pada pasal 8 ayat 1 poin b Bagian Kesatu dalam BAB IV yang berbunyi setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan terdapat pada ayat 3 poin g pada pasal 8 bagian kesatu BAB IV yaitu pendidikan. Diperkuat dengan pasal 21 ayat 1 bagian kedua BAB VI yaitu satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

Program dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a dijabarkan dalam pasal 37 paragraf 1 bagian kelima BAB VII pada poin i. selanjutnya diatur dalam Keputusan Kepala Desa Kepuharjo Nomor: 09/KPTS.KD/2014 membentuk Desa Tangguh di Desa Kepuharjo. Pelaksanaan program pendidikan tangguh bencana dengan mengadakan pelatihan tangguh bencana setiap satu tahun sekali.

Organisasi

Kebijakan penanggulangan bencana melalui program pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo dalam Keputusan Kepala Desa Kepuharjo Nomor: 09/KPTS.KD/2014 tentang Desa Tangguh Bencana yang didalamnya telah membentuk organisasi atau yang biasa disebut F-PRB yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana. Berdasarkan pada peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada BAB IV poin B yaitu Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Kontijensi Desa/ Kelurahan. Pelaksana kebijakan

dan manajemen pelaksana kebijakan penanggulangan bencana melalui program pendidikan tangguh bencana.

Aplikasi

Langkah dalam menerapkan rencana proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui program pendidikan tangguh bencana. Kegiatan pelatihan pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo yaitu:

a. Penanganan Penanggulangan Bencana

Pada hari Rabu, 20 Desember 2017 diadakan kegiatan dari Perangkat Desa untuk pelatihan tangguh bencana berupa materi penanganan penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 09.45 WIB, diikuti oleh perwakilan dusun dan relawan pelatihan ada 39 warga. Pemateri penanganan penanggulangan bencana yaitu Bapak Ahmadi dari relawan binaan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Penanganan Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya dalam memutuskan penetapan kebijakan untuk pencegahan terjadinya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanganan penanggulangan bencana banyak bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan LSM.

b. Posko Bencana

Hari Rabu, 20 Desember 2017 pukul 09.45 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB kegiatan berupa materi yaitu posko bencana. Diikuti oleh perwakilan dusun dan relawan pelatihan ada 39 warga. Pemateri kegiatan pelatihan tangguh bencana adalah Bapak Eka dari relawan TAGANA (Taruna Siaga Bencana). Posko yaitu suatu tempat sebagai kegiatan yang dilaksanakan bersifat tetap atau sementara. Manajemen posko

adalah pengelolaan suatu tempat sebagai pusat kegiatan yang sedang berlangsung.

c. Shelter (Pengungsian)

Pemateri shelter dalam pelatihan tangguh bencana yaitu Bapak Ahmadi relawan TAGANA (Taruna Siaga Bencana). Dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Desember 2017 pukul 10.30 WIB sampai pukul 11.45 WIB, diikuti oleh perwakilan dusun dan relawan pelatihan ada 39 warga. Materi pelatihan tangguh bencana terkait shelter atau pengungsian ini diberikan setelah selesai materi posko bencana oleh Bapak Eka.

d. Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)

Pada hari Rabu, 20 Desember 2017 pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 13.45 WIB kegiatan berupa materi pertolongan pertama gawat darurat (PPGD). Mengikuti pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) ada 39 orang yaitu perwakilan dari warga perdesun dan relawan desa. Pemateri untuk pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) adalah Bapak Ubung.

Bapak Ubung menjelaskan bahwa prinsip dasar Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) diperlukan prinsip yaitu penolong menolong dirinya sendiri, amankan korban, tandai tempat kejadian, usahakan hubungi tim medis, dan tindakan pertolongan.

e. Dapur Umum

Pada hari Rabu, 20 Desember 2017 pukul 13.45 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB kegiatan berupa materi mengenai dapur umum. Perwakilan dusun dan relawan yang mengikuti pelatihan ada 39 orang. Pemateri dapur umum yaitu Bapak Agus selaku dari relawan TAGANA. Bapak Agus menjelaskan bahwa dapur umum merupakan tempat sebagai penyelenggaraan memasak

sementara waktu didalam tenda saat terjadi bencana untuk korban bencana. Tempat penyelenggaraan dapur umum harus dalam keadaan tempat yang aman dari bahaya bencana, terjangkau, terpenuhi dalam waktu tertentu, memenuhi syarat higienis dan sanitasi.

Hari Kamis, 21 Desember 2017 pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB pelatihan tangguh bencana berupa praktik dilapangan atau simulasi. Perwakilan setiap dusun beserta relawan yang mengikuti pelatihan tangguh bencana dihari kedua ada 43 orang. Setelah perwakilan warga perdesun sudah lengkap kemudian dibagi untuk mengikuti pelatihan yang diadakan secara serentak. Pelatihan dapur umum ada 14 orang, dengan dibantu dari relawan TAGANA.

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Pendidikan Tangguh Bencana di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telaah kritis hasil penelitian dengan kajian teori dalam penelitian implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman diimplementasikan dengan lima variabel menurut Van Meter dan Van Horn (Hasbullah, 2015: 98) sebagai berikut:

1. Tujuan dalam Pendidikan Tangguh Bencana Di Desa Kepuharjo

Implementasi kebijakan tidak lepas dari adanya tujuan. Tujuan dari adanya implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yaitu:

- 1) Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;

Desa Kepuharjo merupakan desa yang rawan dengan bencana karena dekat dengan puncak Gunung Merapi jaraknya sekitar 10 km dari puncak Gunung Merapi. Desa Kepuharjo termasuk dalam Desa Tangguh Bencana di wilayah kabupaten Sleman.

Tujuan dari implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana yaitu pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat desa terhadap bencana yang berpotensi diwilayah tersebut. Selain untuk melindungi masyarakat desa juga pemerintah memberikan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang memiliki kepedulian terhadap bencana.

Desa Kepuharjo sudah berstatus sebagai desa tangguh bencana pada tingkat desa/kelurahan tangguh bencana madya. Pada tingkat madya adalah tingkat menengah dengan bercirikan

menurut Hyogo terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yaitu:

- 1) Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau kelurahan.
- 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa.
- 3) Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif.
- 4) Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif.
- 5) Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji.
- 6) Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

Desa Kepuharjo saat ini sudah berada dalam kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tingkat Madya. Berdasarkan hasil wawancara juga karena Desa Kepuharjo sudah memiliki kebijakan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dengan membentuk F-PRB (Forum-Pengurangan Risiko Bencana) dan membuat Rencana Kontijensi Erupsi Merapi Desa Tangguh Bencana Desa Kepuharjo. Adanya kelompok perempuan yang mengikuti relawan siaga bencana dan melibatkan diri dalam

kegiatan-kegiatan simulasi pelatihan tangguh bencana seperti pelatihan shelter dengan membuat tenda, dapur umum, pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), evakuasi, peringatan dini, dan operasi tanggap bencana.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat pemetaan dan analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas Desa Kepuharjo untuk melihat risiko desa yang berpotensi bencana. Dalam dokumen rencana kontijensi erupsi merapi Desa Kepuharjo sudah ada pemetaan kawasan bencana Gunung Merapi dan peta area terdampak erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi. Analisis ancaman awan panas dan jarak dari puncak Merapi di Desa Kepuharjo. Peta kerentanan dan peta kapasitas Desa Kepuharjo.

2. Komunikasi dalam Pendidikan Tangguh Bencana Di Desa Kepuharjo

Komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan. Komunikasi dilakukan untuk koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo. BPBD DIY sebagai pusat koordinasi dari BPBD kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Komunikasi yang terjalin antara BPBD DIY dengan BPBD Sleman komunikatif. BPBD DIY memiliki peran penting dalam memfasilitasi pelatihan Desa Tangguh Bencana. BPBD DIY menyediakan narasumber atau pengisi materi pelatihan tangguh bencana.

Komunikasi berkaitan dengan standar dan tujuan implementasi kebijakan karena penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan harus seragam dan konsisten dari berbagai sumber informasi. Prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para

pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (Van Meter dan Van Horn, dalam Widodo 2007).

Fasilitas komunikasi dalam menunjang Desa Tangguh Bencana memerlukan ht (*handy talky*) karena di Desa Kepuharjo tidak ada fasilitas telepon rumah karena faktor geografis. Setiap rumah warga belum memiliki ht (*handy talky*) untuk melakukan komunikasi bila terjadi bencana. Masyarakat hanya mengandalkan komunikasi dan mengakses informasi lewat telephone genggam atau *handphone* dan radio, padahal sinyal yang berada dekat Gunung Merapi tidak stabil. Ht (*handy talky*) berfungsi untuk memberikan informasi maupun menginformasikan bila terjadi bencana di Desa Kepuharjo. Desa Kepuharjo belum memiliki radio komunikasi atau ht (*handy talky*) yang khusus sebagai *emergency preparedness*.

Implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan tangguh bencana. Dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari Rabu dan Kamis, 20 dan 21 Desember 2017. Dilihat dari pelatihan tangguh bencana tersebut komunikasi dalam pelaksanaannya lancar. Karena selama pelaksanaan berjalan sesuai dengan *rundown* acara.

3. Sumber Daya dalam Pendidikan Tangguh Bencana Di Desa Kepuharjo

Sumber daya dalam menunjang implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana yaitu sumber dana, sumber sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (kesadaran masyarakat) di Desa Kepuharjo. Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tangguh bencana sumber daya berperan penting agar keberhasilan dapat tercapai. Sumber dana sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan atau pelatihan serta pembinaan dalam pelatihan

tanggguh bencana. Desa dalam mengajukan dana ke pemerintah daerah harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sumber dana berasal dari BNPB dan pemerintah daerah.

Sumber dana sangat diperlukan agar pelatihan dan pembinaan berjalan dengan lancar. Desa dalam mengajukan dana ke pemerintah daerah harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Selain sumber dana juga terkait dengan pelaksanaan pelatihan tangguh bencana. Desa Kepuharjo menganggarkan dana untuk pelatihan atau pembinaan pendidikan tangguh bencana sejumlah 150 juta. pelatihan untuk pendidikan tangguh bencana sudah dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember tepatnya hari Rabu dan Kamis, 20 dan 21 Desember 2017. Selain sumber dana, sumber sarana, dan prasarana juga diperlukan untuk memfasilitasi pelatihan untuk pendidikan tangguh bencana. Sarana dan prasarana dalam desa tangguh bencana untuk menunjang pendidikan tangguh bencana meliputi peralatan komunikasi, ruang/gedung, kamar mandi, alat tulis kantor, peta lokasi geografi, peta wilayah topografi, data logistik, televisi, radio, dan sebagainya. Desa Kepuharjo belum memiliki kendaraan evakuasi serta mobil ambulance sebagai bagian dari pelayanan desa. Sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan pelatihan tangguh bencana kemarin disediakan oleh perangkat Balai Desa dan TAGANA. Berupa 2 tenda sebagai pelatihan dari shelter (pengungsian), mobil dapur umum beserta peralatan masak, dan peralatan untuk pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD).

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana yaitu meningkatkan kesadaran serta meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana yang akan

dihadapi di wilayah tempat tinggalnya. Kesadaran masyarakat di Desa Kepuharjo sudah cukup tinggi pasca terjadinya erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Pelatihan tangguh bencana selama 2 hari yaitu hari Rabu dan Kamis, 20 dan 21 Desember 2017 diikuti oleh perwakilan perdesun di Desa Kepuharjo. Kesadaran masyarakat di desa yang berpotensi rawan bencana sangat penting agar dapat melindungi diri dan mengerti langkah yang harus diambil saat terjadinya bencana.

Hal tersebut didukung dalam teori Van Meter dan Van Horn yaitu sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Waktu merupakan bagian yang juga penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan.

4. Sikap Para Pelaksana dalam Pendidikan Tangguh Bencana Di Desa Kepuharjo

Pelaksana dalam implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo yaitu masyarakat desa, perangkat desa, relawan desa (COKRO) dan perwakilan dari relawan TAGANA. Peran dari BPBD DIY sendiri sebagai fasilitator dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana seperti menyediakan narasumber serta meminjamkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelatihan tangguh bencana yang belum dimiliki oleh desa.

Masyarakat desa yang mengikuti pelaksanaan pelatihan tangguh bencana yaitu perwakilan dari setiap dusun di Desa Kepuharjo. Jadi tidak semua masyarakat ikut terlibat dikarenakan waktu pelaksanaan bertepatan dengan hari kerja,

masyarakat yang lain tidak mungkin meninggalkan pekerjaan dan dana yang tidak sepenuhnya mencukupi jika semua masyarakat ikut terlibat, karena setiap ada pelatihan tangguh bencana masyarakat mendapatkan uang transport.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat pada pelatihan penanganan penanggulangan bencana di Desa Kepuharjo adalah TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan Komunitas COKRO yaitu relawan Desa Kepuharjo. Komunitas COKRO merupakan relawan yang masih aktif apabila terjadi dengan bencana di Desa Kepuharjo. Perwakilan dari TAGANA menjadi pengisi materi atau narasumber dalam pelatihan tangguh bencana. Narasumber memiliki pengalaman dan juga ahli dalam materi yang sudah disampaikan.

Hasil penelitian tersebut dikuatkan teori menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri dari badan/instansi/masyarakat pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Subarsono (2006: 7) mengatakan bahwa kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

Respon masyarakat saat mengikuti pelatihan tangguh bencana di Balai Desa Kepuharjo hari Rabu dan Kamis, 20 dan 21 Desember 2017 masyarakat antusias. Masyarakat ada yang kurang antusias dengan pelatihan tangguh bencana dikarenakan belum paham betul arti penting dari adanya mengikuti pelatihan ini. Respon masyarakat mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana.

5. Kondisi Sosial Masyarakat dalam Pendidikan Tangguh Bencana Di Desa Kepuharjo

Kondisi sosial setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi tahun 2010 semakin baik. Karena tingkat kesadaran dalam kepedulian atau rasa empati kepada sesama lebih kuat. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Kepuharjo pernah mengalami bencana di daerah tempat tinggalnya. Setelah erupsi Gunung Merapi dan statusnya sudah dinyatakan aktif normal, masyarakat bisa kembali ke desa. Kemudian masyarakat bersama tim relawan melakukan kerja bakti untuk bersih-bersih desa. Selain itu masyarakat juga aktif pada kegiatan sosial di desa seperti kumpulan bapak-bapak, kumpulan ibu-ibu PKK, F-PRB yang masih aktif sampai sekarang, menyelenggarakan kegiatan budaya seperti jatilan, dan sebagainya.

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Kepuharjo setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi tahun 2010 sudah meningkat, meskipun harus dimulai dari awal karena kehilangan harta benda yang terkena oleh lahar dingin. Meningkatnya perekonomian masyarakat Desa Kepuharjo karena banyak tempat wisata setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi. Selain sebagian besar masyarakat Desa Kepuharjo berprofesi sebagai petani dan peternak, tetapi juga ada yang melakukan pekerjaan sampingan berdagang di tempat wisata. Pendapatan desa jadi meningkat.

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa:

Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal

tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik.....dukungan sumber daya ekonomi dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan dalam lingkungan politik dukungan elit politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Adanya perubahan kondisi tersebut dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan akan mempengaruhi cara mengimplementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana dalam situasi pelaksana kerja yang terjadi dilapangan. Peralihan pemerintah dapat terjadi dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.

Kendala Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Pendidikan Tangguh Bencana di Desa Kepuharjo

Implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo tidak terlepas dari kendala yang dihadapi saat menyelenggarakan pendidikan tangguh bencana di lapangan. Kendala internal yaitu kendala yang berasal dari dalam implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana seperti penyediaan fasilitas peralatan untuk menunjang pelatihan tangguh bencana dan pendanaan yang harus menunggu lama agar pendidikan tangguh bencana dapat dilaksanakan. Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana sampai saat ini kendala yang dihadapi tidak ada.

Kendala internal dalam menunjang implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana yaitu sarana prasarana seperti peralatan

untuk memfasilitasi pendidikan tangguh bencana dalam penyelenggaraan pelatihan tangguh bencana, kesulitan dalam mencari peralatan untuk menebang pohon yang tumbang karena terkena angin puting beliung, kendaraan evakuasi, mobil ambulans desa, dan sarana komunikasi yang masih belum memadai.

Kendala eksternal dalam menunjang implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana saat ini tidak ada karena sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dan MOU (*Memorandum Of Understanding*) untuk bekerjasama dengan desa-desa yang aman terhadap bencana. Desa-desa yang aman terhadap bencana sudah ada SOP dan MOU, desa aman memberikan tempat pengungsian untuk masyarakat desa yang rawan terhadap bencana biasa disebut dengan *sister village* (desa paseduluran atau desa penyangga).

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti selama berada di lapangan antara lain waktu penelitian dilapangan. Karena masyarakat yang diwawancarai memiliki kesibukan kerja, jadi wawancara sempat tertunda. Selain itu setelah data yang ditemukan dilapangan sudah memenuhi atau mencukupi akan tetapi peneliti baru mendapatkan kabar setelah penelitian selesai bahwa pelatihan tangguh bencana diadakan di akhir tahun yaitu pertengahan bulan Desember. Tetapi peneliti tetap melaksanakan penelitian lagi untuk menambahkan data.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana di Desa Kepuharjo yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan tangguh bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana. Desa Kepuharjo tahun ini sudah masuk pada desa/kelurahan tangguh bencana tingkat madya.
2. Kendala internal dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tangguh yaitu terkait sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kemudian kendala eksternal permasalahan pendanaan belum ada karena mengganggu pencairan dana dari pemerintah. Perlu untuk diajukan dan menganggarkan dana untuk diajukan kepada pemerintah daerah.

Implikasi

Pemaparan dari hasil penelitian pada BAB IV perlu adanya upaya untuk mengembangkan kapasitas seluruh masyarakat di Desa Kepuharjo dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tangguh bencana sebagai berikut :

1. Aspek-aspek yang diteliti dan penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan kualitatif deskriptif, maka untuk lebih mendalam faktor-faktor apa saja yang turut berpengaruh dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan tangguh bencana.

2. Penelitian implementasi kebijakan pendidikan tangguh bencana yang dilakukan peneliti memiliki hubungan dengan kebijakan pendidikan di tingkat pendidikan non-formal karena sasaran penelitian atau subjek penelitian adalah masyarakat desa. Pendidikan tidak terpaku hanya dengan pendidikan formal maupun informal, tetapi juga pendidikan non-formal yaitu di masyarakat.

Saran

Saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pendidikan berdasarkan analisis hasil penelitian yaitu:

1. Bagi Perangkat Desa Kepuharjo dan F-PRB Desa Kepuharjo
 - a. Pendidikan tangguh bencana dalam penyelenggaraan pelatihan tangguh bencana yang diadakan selama satu tahun sekali yang diikuti oleh perwakilan masyarakat perdesun di Desa Kepuharjo dilakukan secara bergilir.
 - b. Pendidikan tangguh bencana dalam penyelenggaraan pelatihan tangguh bencana bisa dilakukan dengan pelatihan skala besar yang diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Kepuharjo, pelaksanaan pelatihan dihari libur.
 - c. Pendidikan tangguh bencana dalam penyelenggaraan pelatihan tangguh bencana seharusnya dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Kepuharjo.
 - d. Perangkat desa menganggarkan dana yang lebih untuk melaksanakan pelatihan tangguh bencana dalam skala besar yang diikuti oleh seluruh masyarakat.
 - e. Perangkat desa dan F-PRB bekerjasama dengan BPBD Sleman, SAR, dan TAGANA

dalam menyelenggarakan pendidikan tangguh bencana.

- f. Perangkat desa menganggarkan serta mengajukan dana kepada pemerintah untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana Destana.
2. Bagi Pemerintah
 - a. BPBD DIY bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan tangguh bencana untuk masyarakat desa yang bertempat tinggal di daerah rawan atau risiko bencana.
 - b. Perwakilan dari BPBD DIY memonitoring kegiatan pelatihan tangguh bencana pada saat pelaksanaan pelatihan tangguh bencana dilapangan karena BPBD DIY sebagai coordinator di daerah Yogyakarta.
 - c. Kemendikbud bekerjasama dengan BNPB untuk mengembangkan kebijakan serta menyelenggarakan program pendidikan serta pelatihan tangguh bencana di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2016). *10 Tahun Gempa Yogyakarta*. Yogyakarta: Geomagz. Diakses melalui <http://geomagz.geologi.esdm.go.id/10-tahun-gempa-yogyakarta/>. Pada tanggal 22 April 2017 Pukul 10.12 WIB.
- Amri, A. (2017). *Pendidikan Tangguh Bencana: Mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Indonesia*. Jakarta : Kemendikbud.
- B. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

- Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2014). *Gunung Merapi Sejarah Letusan*. Bandung: Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Diakses melalui <http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/542g-merapi?start=1>. Pada tanggal 12 Juli 2017 Pukul 10.23 WIB.
- Basuki, Sulistyono. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- BNPB. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*.
- BNPB. (2012). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1, Tahun 2012, Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*.
- Depsikbud. (2013). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Habullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Pengertian Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Londok, I.C. (2015). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Suatu Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)*. Diakses melalui laman <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/4502> pada tanggal 8 Juni 2017 Pukul 20.31 WIB.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah. (2010). *Desa Kepuharjo*. Diakses melalui <http://kepuharjodes.slemankab.go.id/> Pada tanggal 21 Juli 2017 Pukul 20:33 WIB.
- Pemerintah DIY. (2010). *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Pemerintahan. (2010). *Kondisi Geografis*. Yogyakarta. Diakses melalui <http://jogjaprovo.go.id/pemerintahan/situs-tautan/view/kondisi-geografis>. Pada tanggal 14 Mei 2017 Pukul 20.15 WIB.
- Perry, R. W., & Mushkatel, A. H. (1984). *Disaster Management: Warning Response and Community Relocations*. Westport: Quorum.
- Purwanto, Agus E. & Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Lakbang Mediatana.
- Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satori, D. dan Komariah, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Somers, S. & Svara, J. H. (2009). *Assessing and Managing Environmental Risk: Connecting Local Government Management with Emergency Management*. *Public Administration*.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syaodih, N. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tobing, L. (2013). *Hukum Meninggalkan Orang yang Membutuhkan Pertolongan*. Jakarta: Hukum Online. Diakses melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e7e98c908da/hukum-meninggalkan-orang-yang-membutuhkan-pertolongan>. Pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 23:03 WIB.
- Tribun News. (2016). *Hari ini Tepat 6 Tahun Lalu Merapi Meletus Dahsyat Begini Detik-detik Menegangkan Itu Terjadi*. Yogyakarta: Tribunnews. Diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/2016/hari-ini-tepat-6-tahun-lalu-merapi-meletus-dahsyat-begini-detik-detik-menegangkan-itu-terjadi/>. Pada tanggal 17 Mei 2017 Pukul 09.10 WIB.
- Utaminingsih, A., Azis, A.A., & Hakim, M.L. (2014). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Daerah (Studi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang)*. Diakses melalui <http://lppm.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/alifiulahtin.pdf>. Pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 21.08 WIB.
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (2005). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media.
- Wiyanto, A. (2004). *Terampil Menulis Paragraf*. Jakarta: Grafind